

EVALUASI PERKEMBANGAN DAERAH OTONOM BARU (Studi Kasus Kabupaten Tana Tidung)

Andi Amriampa,¹ H. Masjaya,² Heryono Susilo Utomo³

Abstrak

Penelitian ini dalam rangka mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru di Kabupaten Tana Tidung dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tana Tidung.

Fokus penelitian ditetapkan meliputi 5 aspek dalam evaluasi perkembangan daerah otonom baru yaitu : pembentukan organisasi perangkat daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengisian personil, penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan adanya dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tana Tidung terutama dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2009 dan 2010 dengan mengingat bahwa Tahun 2009 adalah Tahun Politik yakni Penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung. Tahun 2010 adalah transisi pergantian kepemimpinan di Kabupaten Tana Tidung dari Penjabat Bupati kepada Bupati dan Wakil Bupati Defenitif.

Kata Kunci : *Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

Pendahuluan

Lahirnya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418) yang menjadi acuan teknis pemerintah daerah dalam roda pemerintahan di Kabupaten/Kota. Di era reformasi ini penyelenggaraan pemerintahan baik di

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman

² Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman

³ Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman

pusat sampai kepada daerah sepenuhnya diharapkan dapat mewujudkan *good governance*, untuk itu penataan birokrasi perlu terus dilakukan. Sehingga perlu adanya satu reformasi birokrasi yang benar - benar di dukung kuat oleh segenap komponen bangsa dari pusat sampai daerah yang mampu menempatkan kelembagaan birokrasi yang terus tertata, sebagai struktur penopang yang kuat dan proporsional.

Birokrasi di Indonesia menurut Suleiman (dalam Purwanto dan Kumorotomo, 2005) bersifat *technocratic power and arrogance* dengan banyaknya teknokrat dan ekonom yang mendominasi birokrasi. Akibatnya ukuran-ukuran ekonomi yang dikembangkan birokrasi untuk melihat keberhasilan perannya dalam memajukan negeri menjadi begitu dominan. Parkinson juga menjelaskan bahwa birokrasi publik juga bersifat *expansionist impulse*, merambah ke segenap tata kehidupan disamping *red tape and routine* yang cenderung melahirkan rutinitas serta menghindari inovasi baru yang penuh resiko. Akhirnya, kinerja birokrasi publik dalam melayani masyarakat menjadi identik dengan ketidakefisienan. Adanya temuan Sumitro mengenai kebocoran anggaran sekitar 30% yang kemudian istilah kebocoran diralat menjadi pemborosan, merupakan fenomena lain yang menunjukkan ketidakefisienan birokrasi.

Permasalahan pelayanan publik yang tidak efektif dipicu oleh berbagai hal yang kompleks, mulai dari budaya birokrasi yang masih bersifat paternalistik, lingkungan kerja yang tidak kondusif terhadap perubahan zaman, rendahnya sistem *reward* dalam birokrasi di Indonesia, lemahnya mekanisme *punishment* bagi aparat birokrasi, rendahnya kemampuan aparat birokrasi untuk melakukan tindakan diskresi, serta kelangkaan komitmen pimpinan daerah untuk menciptakan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan transparan.

Birokrasi yang berada di tengah-tengah masyarakat dinamis tersebut seharusnya tidak dapat tinggal diam, tetapi harus mampu memberikan berbagai kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Widjaja (2002) menyatakan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian birokrasi dalam mengantisipasi akan kebutuhan pelayanan tersebut :

- a. Sifat pendekatan tugas, lebih mengarah kepada pengayoman dan pelayanan masyarakat, bukan pendekatan kekuasaan dan kewenangan.
- b. Penyempurnaan organisasi, efisien, efektif dan profesional.
- c. Sistem dan prosedur kerja cepat, tepat dan akurat.

Birokrasi modern seharusnya tidak lagi berpikir bagaimana membelanjakan dana yang tersedia dalam anggaran, tetapi bagaimana membelanjakan anggaran yang terbatas seefisien mungkin, dan memanfaatkan dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintah daerah otonom. Pendekatan ini akan mengubah pola penyelenggaraan secara lebih efisien serta memungkinkan untuk mengukur produktivitas kerja birokrasi atau kinerja birokrasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dimana dalam peraturan itu dijelaskan tentang asas – asas yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru yaitu spesifik; obyektif; berkesinambungan; terukur; dapat diperbandingkan; dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh sebab itu, spesifik; obyektif; berkesinambungan; terukur; dapat diperbandingkan; dan dapat dipertanggungjawabkan. Asas ini mungkin memang terasa klise di tengah berbagai penyelenggaraan yang hampir menggerogoti semua institusi publik. Tetapi harus tetap diupayakan untuk menciptakan sistem pemerintahan daerah yang baik.

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien dengan prinsip *good governance*. Maka Kepala Daerah selain melaksanakan tugas dan wewenang juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai mana diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini selanjutnya merupakan evaluasi dari kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah.

Evaluasi

Menurut umar (2002:1), Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauhmana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

Dunn (1999) (dalam Kadji, 2008:30) mengemukakan bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian. Evaluasi mempunyai fungsi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan/program, dalam hal ini

mengungkap seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dapat dicapai.

Dengan demikian evaluasi membandingkan antara apa yang direncanakan dengan hasil yang dicapai. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa evaluasi merupakan upaya untuk mengetahui apakah ada kaitan atau hubungan antara rancangan program dengan hasil yang dicapai.

Subjek evaluasi adalah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi, sedangkan sasaran evaluasi adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilai menginginkan informasi tentang sesuatu.

Untuk melakukan evaluasi terhadap program yang telah diimplementasikan ada beberapa metode evaluasi, yakni: (1) *Single program after-only*; (2) *Single program before-after*; (3) *Comparative after-only* dan (4) *Comparative before-after*.

Evaluator dapat menggunakan kelompok kontrol disamping menggunakan kelompok eksperimen. Yang dimaksud kelompok eksperimen adalah kelompok yang mendapat program atau dikenai kebijakan. Sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok tidak mendapat program tetapi memiliki karakteristik yang sama atau hamper sama dengan kelompok eksperimen. Evaluator juga dapat membandingkan kondisi sebelum dan sesudah diimplementasikan suatu program, atau hanya melihat kondisi setelah suatu program diimplementasikan. Masing-masing jenis evaluasi tersebut akan menghasilkan jenis informasi dan data yang berbeda.

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada BAB 1 Ketentuan Umum Nomor 13 dinyatakan bahwa Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah yang baru dibentuk. Nomor 14 dinyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sisternatis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.

Selanjutnya Nomor 15, dijelaskan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat EKPOD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Dan Nomor 16 diterangkan bahwa Evaluasi Daerah Otonom Baru yang selanjutnya disingkat EDOB adalah evaluasi terhadap perkembangan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah pada daerah yang baru dibentuk.

Metode Penelitian

Untuk penelitian tentang evaluasi perkembangan daerah otonom baru (DOB) di Kabupaten Tana Tidung ini, teknis analisis data yang akan digunakan adalah analisis data dengan menggunakan model *interactive model of analysis*.

Pada model analisis interaktif ini peneliti bergerak pada empat komponen, yaitu pengumpulan data, data reduksi (*reduction data*), data display dan *concluding drawing*, yaitu terdiri dari tahap penyisiran dan verifikasi (Milles dan Huberman, 1992 : 20). Model ini menganjurkan peneliti untuk tetap selalu mempertimbangkan tiga komponen analisis dengan kegiatan pengumpulan data, selama proses pengumpulan data berlangsung dan sesudah pengumpulan data selesai dengan menggunakan waktu yang ada untuk penelitian ini.

Hasil Penelitian

Strategi dan arah kebijakan daerah merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah KabupatenTana Tidung, sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan pengembangan daerah dalam rangka pencapaian tujuan utama pembentukan KabupatenTana Tidung itu sendiri, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan isu – isu stratejik, dan permasalahan pembangunan daerah serta proyeksi keadaan yang diharapkan dapat diwujudkan, maka prioritas daerah secara keseluruhan diarahkan kepada 8 (Delapan) agenda prioritas pembangunan, yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas SDM sehingga bisa menjadi aset utama keunggulan kompetitif;
- 2) Mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana untuk menjangkau daerah-daerah yang masih terisolir;
- 3) Memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, adil dan transparan;
- 4) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari;
- 5) Mengembangkan budaya dan pariwisata berbasis lokal;
- 6) Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 7) Membangun kemitraan antar daerah di wilayah utara Kaltim;
- 8) Pengembangan agroindustri dan pertanian dalam arti luas sehingga dapat menghasilkan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar lokal, nasional dan internasional.

Aspek-Aspek Penilaian Perkembangan Daerah Otonom Baru di KabupatenTana Tidung.

1. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka penataan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah KabupatenTana Tidung dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan asistensi terhadap Organisasi Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan visi dan misi serta urusan yang dimiliki daerah, kebutuhan, kemampuan, dan ketersediaan sumber daya aparatur serta hasil analisis jabatan dan beban kerja dilakukan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah KabupatenTana Tidung. Pembentukan Oraganisasi Perangkat Daerah mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah KabupatenTana Tidung Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTana Tidung;
- b. Peraturan Daerah KabupatenTana Tidung Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah KabupatenTana Tidung.
- c. Peraturan Daerah KabupatenTana Tidung Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- d. Peraturan Daerah KabupatenTana Tidung Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah KabupatenTana Tidung;

2. Pengisian Personil.

Untuk melaksanakan pengisian kepegawaian pada formasi yang telah dibentuk dalam struktur organisasi Perangkat Daerah KabupatenTana Tidung, maka telah ditempuh beberapa cara sebagai berikut:

1. Pengisian Jabatan struktural Sekretariat Daerah (Eselon II/a) telah dilaksanakan melalui prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni sejak pengajuan nama-nama calon sekretaris Daerah kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan ditetapkannya Sekretaris Daerah KabupatenTana Tidung. Pada Tanggal 9 September 2008 telah dilaksanakan pelantikan jabatan Sekretaris Daerah KabupatenTana Tidung yakni Bapak Ir. Abdul Raup, M.Si, oleh Penjabat Bupati Tana Tidung. Namun pada akhir tahun 2009, Penjabat Bupati Tana Tidung

kembali melantik Drs. Mochsin Achkam, M.Si sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah menggantikan Ir. Abdul Raup, M.Si.

2. Pengisian jabatan struktural lainnya selain Sekretaris Daerah telah dilaksanakan melalui pelantikan pejabat Struktural, yang sudah terisi pada posisi jabatan struktural yang tersedia.

3. Pengisian pegawai juga telah dilaksanakan dengan membuka dan memberi kesempatan kepada masyarakat melalui pendaftaran formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sudah disediakan.

3. Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dalam penetapan keanggotaan DPRD Kabupaten Tana Tidung Periode ke-2 didasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.44-8329 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTana Tidung Tanggal 3 Agustus 2009, maka Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTana Tidung Masa Jabatan Tahun 2009-2014.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.44-12557 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTana Tidung tanggal 23 Nopember 2009, meresmikan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTana Tidung masa jabatan tahun 2009-2014,

Penetapan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTana Tidung berdasarkan:

1. Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTana Tidung Nomor 02/DPRD-KTT/XI/2009 tanggal 02 Nopember 2009 tentang Penetapan Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTana Tidung Periode 2009-2014;
2. Surat Penjabat Bupati Tana Tidung Nomor 171.2/150/TAPEM/XI/2009 tanggal 02 Nopember 2009 perihal Usulan Peresmian Penetapan Pimpinan DPRD KabupatenTana Tidung Periode 2009-2014;
3. Surat Ketua Sementara DPRD KabupatenTana Tidung Nomor 170/408/DPRD/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 perihal Usulan Penetapan Unsur Pimpinan DPRD KabupatenTana Tidung Periode 2009-2014.

4. Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Pilihan.

Penyelenggaraan Urusan Wajib dan pilihan di Kabupaten Tana Tidung meliputi :

- a. Urusan Wajib Pendidikan
- b. Urusan Wajib Kesehatan
- c. Urusan Wajib Lingkungan Hidup
- d. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
- e. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
- f. Urusan Wajib Kependudukan & Catatan Sipil
- g. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- h. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
- i. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
- j. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
- k. Urusan Wajib Sosial

Sedangkan Urusan Pilihan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Urusan Pilihan Pertanian
- b. Urusan Pilihan Kehutanan
- c. Urusan Pilihan Energi Dan Sumber Daya Mineral
- d. Urusan Pilihan Industri

5. Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D)

Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah diuraikan dalam Urusan Wajib dan pilihan di Kabupaten Tana Tidung meliputi :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 497.969.865.018,00
- b. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 978.614.137.737,26

Pembahasan

Mengacu kepada 5 (lima) aspek yang menjadi indikator dalam evaluasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru di Kabupaten Tana Tidung, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Tana Tidung pada Tahun Anggaran 2009 terdiri atas :
 - a. 1 (satu) Sekretaris Daerah;
 - b. 3 (tiga) Asisten Setda;
 - c. 9 (sembilan) Bagian;
 - d. 1 (satu) Sekretaris DPRD

- e. 10 (sepuluh) Dinas;
- f. 7 (tujuh) Lembaga Teknis Daerah;
- g. 3 (tiga) Camat.

Sedangkan pengisian personil pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Tana Tidung pada Tahun Anggaran 2010 terdiri atas :

- a. 1 (satu) Sekretaris Daerah (Jabatan Lowong)
- b. 3 (tiga) Asisten Setda;
- c. 9 (sembilan) Bagian;
- d. 1 (satu) Sekretaris DPRD
- e. 10 (sepuluh) Dinas, (1 Jabatan Lowong);
- f. 7 (tujuh) Lembaga Teknis Daerah;
- g. 3 (tiga) Camat.

Perbedaan Personil pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Tana Tidung pada Tahun Anggaran 2009 dan 2010 terjadi karena Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung mengundurkan diri dan selanjutnya mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung pada Pemilu pada Kabupaten Tana Tidung pada Akhir Tahun 2009;

2. Pengisian Personil sebelum Tahun 2009 berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari PNS Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Tarakan, dan Kota Balikpapan yang berjumlah 705 orang. Sedangkan pada Tahun 2010 jumlah personil sebanyak 1050 orang;
3. Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Tidung sampai dengan pertengahan Tahun 2009 sebanyak 20 (dua puluh) orang yang bersumber dari hasil Pemilu Legislatif Tahun 2004. Sedangkan pada Tahun 2010 jumlahnya tetap sama 20 (dua puluh) orang namun keanggotaannya berasal dari hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009;
4. Penyelenggaraan urusan wajib dan pilhan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada Tahun Anggaran 2009 dengan 11 urusan wajib dan 4 urusan pilihan sedangkan pada Tahun Anggaran 2010 sebanyak 10 urusan wajib dan 4 urusan pilihan yang terbagi dalam pelaksanaannya oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung;
5. Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D) Kabupaten Tana Tidung

Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat disimpulkan dalam gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 dan 2010 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pagu dana dalam penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2009 sebesar Rp. 497.969.865.018 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Belas Ribu Rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 225.281.183.580,14 (*Dua Ratus Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah Empat Belas Sen*);
- b. Sedangkan Anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2010 sebesar Rp. 978.614.137.737,26 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Empat Belas Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Tibu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Dua Puluh Enam Sen*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 654.080.583.884 (*Enam Ratus Lima Puluh Empat Miliar Delapan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*);

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 5 (lima) aspek yang menjadi indikator dalam evaluasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru di Kabupaten Tana Tidung, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Tana Tidung pada Tahun Anggaran 2009 memiliki perbedaan personil pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Tana Tidung pada Tahun Anggaran 2009 dan 2010 terjadi karena Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung mengundurkan diri dan selanjutnya mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung pada Pemilu pada Kabupaten Tana Tidung pada Akhir Tahun 2009;
2. Pengisian Personil sebelum Tahun 2009 berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari PNS Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Tarakan, dan Kota Balikpapan yang berjumlah 705 orang dengan pertambahan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Tana Tidung pada Tahun 2010 sebanyak 345 orang sehingga jumlah personil keseluruhan sebanyak 1050 orang;
3. Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Tidung sampai dengan pertengahan Tahun 2009 sebanyak 20 (dua puluh) orang yang bersumber dari hasil Pemilu Legislatif Tahun

2004. Sedangkan pada Tahun 2010 jumlahnya tetap sama 20 (dua puluh) orang namun keanggotaannya berasal dari hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009;

4. Penyelenggaraan urusan wajib dan pilhan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada Tahun Anggaran 2009 dengan 11 urusan wajib dan 4 urusan pilihan sedangkan pada Tahun Anggaran 2010 sebanyak 10 urusan wajib dan 4 urusan pilihan yang terbagi dalam pelaksanaannya oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung;

5. Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D) Kabupaten Tana Tidung

Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat disimpulkan dalam gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 dan 2010 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar 45,24%;
- b. Sedangkan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2010 sebesar 67,23%;

Saran-saran

Terkait dengan evaluasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tana Tidung sebagai daerah otonom baru, maka disaran solusi yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas jalannya roda pemerintahan Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut :

1. Fasilitasi dukungan dan motivasi kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam rangka pengelolaan urusan rumah tangganya, baik pengelolaan urusan wajib maupun pengelolaan urusan pilihan yang menjadi kewenangannya agar senantiasa diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Provinsi Kalimantan Utara);
2. Dukungan percepatan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat juga sangat diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar akan ketersediaan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan potensi sumber daya alam yang berada dalam wilayah Kabupaten Tana Tidung;
3. Fasilitasi pemberian akses kepada pihak ketiga, terkhusus bagi para investor yang dapat melaksanakan investasi di Kabupaten Tana Tidung, sehingga dapat mempercepat perkembangan daerah dan perluasan lapangan pekerjaan;
4. Dukungan anggaran dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada awal keberadaan pemerintahan di

Kabupaten Tana Tidung sangat dibutuhkan, dan seyogyanya dengan jumlah yang signifikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini belum terealisasi dan masih menjadi prioritas pembangunan.

Daftar Pustaka

- _____, **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004**, tentang *Pemerintahan Daerah* Indonesia. Jakarta.
- _____, **Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004**, tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*, Indonesia. Jakarta.
- _____, **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007** tentang *Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*;
- _____, **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008** tentang *Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*
- _____, **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010** tentang *Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru*
- Bungin, Burhan. 2006. ***Metodologi Penelitian Kuantitatif***. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Bratakusumah, Supriady, Dedy dan Solihin, Dadang. 2001. ***Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah***. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Haris, Syamsuddin. 2005. ***Desentralisasi dan Otonomi Daerah***. LIPI Press. Jakarta.
- Jarjis, 1999. ***Pengaruh Birokrasi Modern dalam Otonomi Tradisional di Minangkabau***. Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Kaho. Josef Riwu, 1997. ***Prospek Otonomi Daerah di Negara RI***. Rajawali Press. Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1995. ***Pemberdayaan Masyarakat, Sebuah Tinjauan Administrasi***. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Pada FIA Unibraw. Malang.
- Katz, Saul. 1965. ***Guide To Modernizing Administration For National Development***. Washington DC., Comparative Administration Group. American Society Of public Administration.

- Osborne, David dan Ted Gaebler. 1992. ***Reinventing Government : How Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector***. Reading. Addison – Wesley Publishing Co. Inc. Massachusetts.
- Rasyid, M. Ryaas,. 1997. ***Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru***. Yarsif Watampone. Jakarta.